



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PROBITY ADVICE

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

www.lkpp.go.id

PERKA 14 TAHUN 2018 TENTANG LKPP DAPAT MELAKUKAN PENDAMPINGAN

Pasal 170

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, **ADVOKASI**, pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi dalam proses pengadaan di Pemerintah Daerah

PROBITY ADVICE

Probity Advice adalah pemberian pendapat/advice pada tiap tahapan pengadaan yang menerapkan prinsip probity sekaligus mitigasi risiko

POLA PIKIR MASALAH

PROBITY ADVICE

- Belanja pemerintah melalui pengadaan meningkat
- Kompleksitas meningkat
- Sarat Kepentingan



- Tidak menghasilkan *Best Value For Money*
- Partisipasi Pelaku Usaha Rendah
- Terjadi Permasalahan Hukum (Persaingan Usaha, Pidana, dll)
- Terdapat Pengaduan (Penyimpangan Prosedur, KKN, Persaingan Usaha Tidak Sehat)



IMPLEMENTASI *PROBITY ADVICE*



KEBIJAKAN PEMERINTAH TERANCAM

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Layak Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik



DAMPAK

Berkurangnya kepercayaan masyarakat atas layanan publik dari pemerintah

TUJUAN

PROBITY ADVICE

1. Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang menghasilkan *value for money*
2. Meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa
3. Menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa
4. Mengurangi resiko sengkah, pengaduan, atau permasalahan hukum
5. Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bebas konflik kepentingan dan adil

KRITERIA PAKET YANG DAPAT DIDAMPINGI

PROBITY ADVICE

berisiko tinggi dan bersifat kompleks

memiliki sejarah yang kontroversial atau terdapat masalah hukum

sangat sensitif secara politis

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan

berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas

untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat

bernilai relatif besar

PARA PIHAK

DALAM *PROBITY ADVICE*

ADVISOR

ASN dan Non-ASN

- Kompetensi di bidang Pengadaan
- Berintegritas
- Tersebar di sebagian besar Provinsi

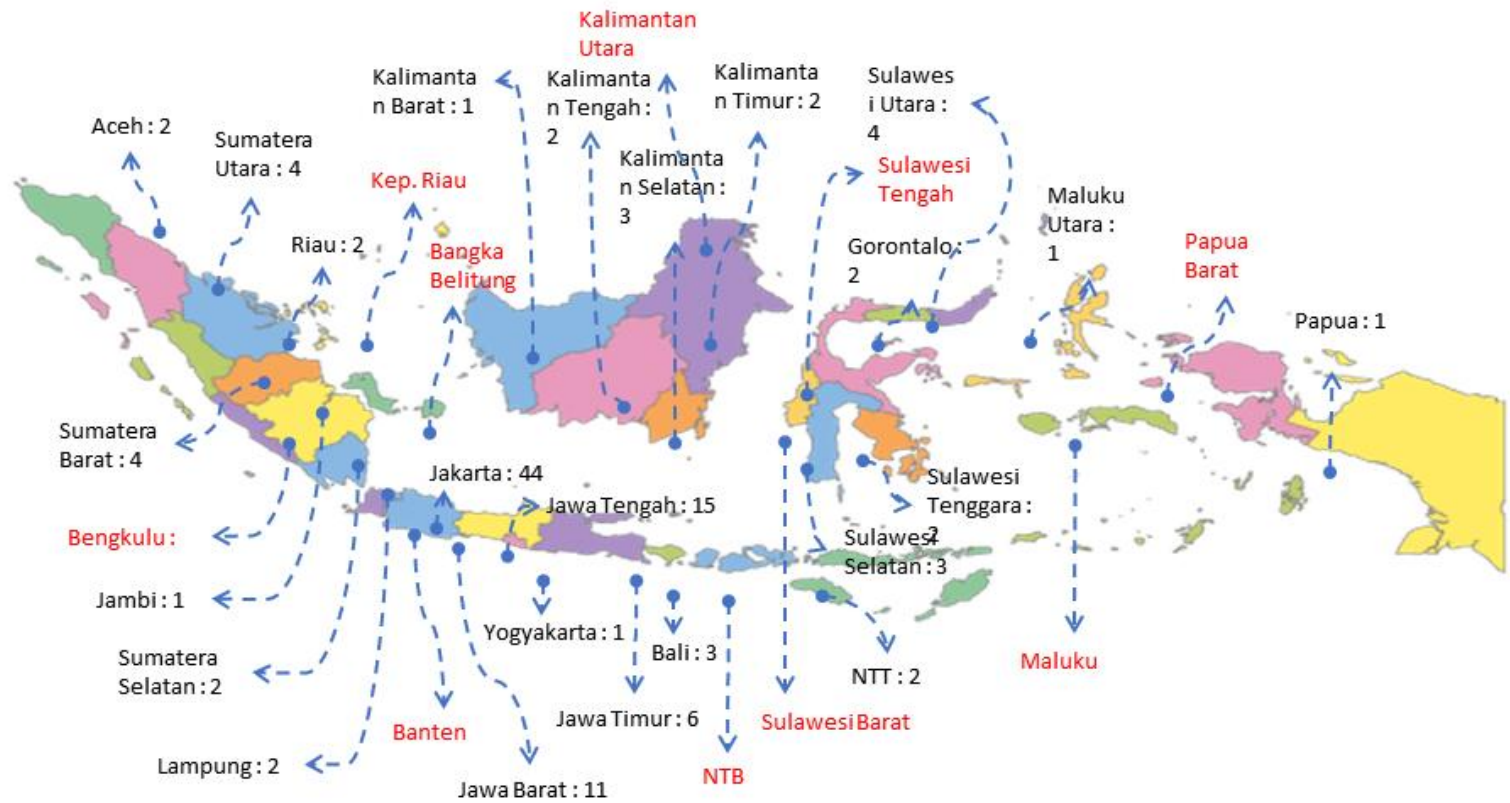
ADVISEE

1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Daerah
3. BUMN/BUMD
4. BLU/BLUD

SEBARAN ADVISOR PROBITY ADVICE

Total Jumlah Advisor

116



PENERAPAN LAYANAN *PROBITY ADVICE*

TOTAL EFISIENSI 2018:

Rp127 M

Gedung RSUD Kab. Kulonprogo (2018)

- Pagu 270 Miliar → Kontrak 258,3 M → efisiensi 11,7 M

Konstruksi & MK Gedung RSIA Bandung (2018)

- Pagu 332,3 Miliar → Kontrak 330,6 M → efisiensi 1,8 M

TOTAL EFISIENSI 2019:

Rp71 M

Gedung RSUD Soreang Kab. Bandung (2019)

- Pagu 318,6 Miliar → Kontrak 296,3 M → efisiensi 22,3 M